



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH



# LAPORAN KINERJA 2018

---

**BALAI PELESTARIAN  
NILAI BUDAYA ACEH**  
(Wilayah Kerja Provinsi Aceh - Sumut)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**



## KATA PENGANTAR

### Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh



Puji syukur, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyusun dan menerbitkan Laporan Kinerja tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemetintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga dari periode Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh tahun 2015-2019. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPNB Aceh tahun 2018.

Pada perjanjian kinerja BPNB Aceh tahun 2018 ditetapkan 1 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja. Secara umum BPNB Aceh berhasil merealisasikan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut.

BPNB Aceh merupakan ujung tombak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara karena lembaga ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang

memiliki wilayah kerja di kedua provinsi tersebut. Untuk itu, lembaga ini selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang rutin menjadi programnya, tetapi juga ikut melaksanakan atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Aceh dan Sumatera Utara.

Tantangan dan permasalahan saat ini adalah peningkatan keterlibatan publik di bidang kebudayaan dan pelestarian budaya di tengah kencangnya arus global. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan maka BPNB Aceh berusaha menjalankan amanat undang-undang tersebut dan juga mengajak semua pihak terkait untuk berkonsolidasi untuk memajukan kebudayaan dengan bersama-sama melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, serta melakukan Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan BPNB Aceh selama tahun 2018. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja tahun 2018 Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.

Banda Aceh, 22 Januari 2018  
Kepala  
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh



**Iriani Dewi Wanti, S.S., M.SP.**  
NIP. 197105231996012001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi .....	6
D. Isu Strategis Organisasi .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
A. Visi dan Misi .....	9
B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	10
C. Perjanjian Kinerja .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	13
A. Capaian Kinerja BPNB Aceh .....	13
B. Realisasi Anggaran.....	21
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	25

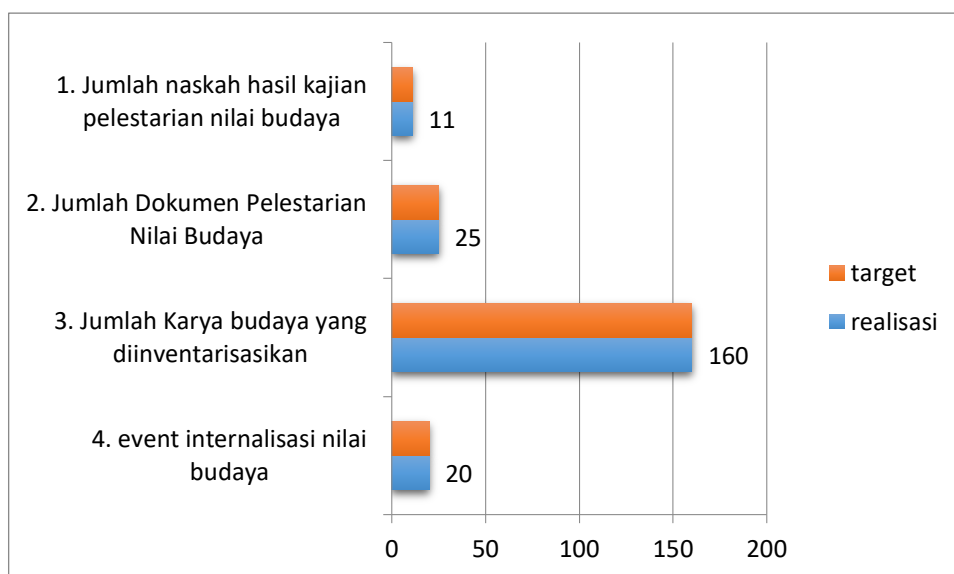
### LAMPIRAN

- Lampiran 1. Renstra BPNB Aceh 2015-2019
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2018
- Lampiran 4. Pernyataan Telah Direviu

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja tahun 2018 Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan selama satu tahun anggaran. Dalam satu tahun terakhir ini telah dilakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh tahun 2015-2019. Laporan kinerja ini melaporkan ketercapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh yang telah diperjanjikan dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Sesuai data pengukuran kinerja tahun 2018 dari sebanyak 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, seluruhnya berhasil mencapai target yang ditetapkan seperti yang terlihat pada grafik berikut:



Sedangkan untuk kinerja keuangan, dari total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp 10.342.166.000. Dari pagu anggaran tersebut telah berhasil terserap sebesar Rp 10.072.764.707 sehingga persentase daya serap BPNB Aceh untuk tahun 2018 adalah sebesar 97,40 %.

Dalam mencapai target di atas, terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi. Yang pertama, beberapa pelaksanaan kegiatan sempat tertunda karena menunggu kesiapan dari pemerintah daerah terkait. Dan yang kedua, masih kurangnya SDM di lingkungan BPNB Aceh untuk melaksanakan kegiatan pelestarian budaya di dua provinsi yang menjadi wilayah kerja BPNB Aceh.

Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain; mendorong pemerintah daerah untuk memiliki komitmen kuat dalam menjalankan program bersama demi pelestarian budaya di daerahnya, bekerja sama dengan tokoh atau pelaku budaya dalam melaksanakan kegiatan pelestarian budaya di Aceh dan Sumatera Utara.

Secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa hasil capaian kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh tahun 2018 telah memenuhi sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam pelaksanaan program Pelestarian Nilai Budaya. BPNB Aceh kedepan akan tetap melakukan yang terbaik sekuat tenaga, dengan melibatkan berbagai stakeholder dibidang kebudayaan untuk memajukan kebudayaan dan membentuk karakter masyarakat yang berbudaya dan berkarakter.





# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan pembukaan UUD 1945 batang tubuh konstitusi tersebut pada pasal 20 pasal 21 pasal 28 c ayat 1 pasal 31 dan pasal 32 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang dengan amanat undang undang dasar 1945.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan menyelenggarakan pendidikan meliputi ketersediaan memberikan pelayanan pendidikan yang merata diseluruh wilayah karena pendidikan merupakan hak asasi manusia dimana setiap warga negara berhak proses pendidikan yang bermutu dan berhak memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Pembangunan kebudayaan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup tercapainya suasana kehidupan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab secara harmonis

dalam berkehidupan yang sejalan dengan nilai nilai kebangsaan.

Pembangunan Kebudayaan Indonesia harus mampu mendukung misi pemerintah dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, serta pelestarian dan pengelolaan kebudayaan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal. Pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Pembangunan Kebudayaan tentunya mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, RPJMN dan RPJPN sebagaimana dijabarkan di atas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa arah kebijakan pembangunan kebudayaan antara lain adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika dan berbudaya, ditandai oleh (a) terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; dan (b) makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan di Indonesia. Kebudayaan Indonesia berkaitan dengan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya masyarakat yang tinggal mendiami wilayah Indonesia.

Kebudayaan Indonesia yang terbentuk dari ratusan budaya daerah memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Di sini ditemukan ratusan adat istiadat, kesenian, dan bahasa sukubangsa yang berbeda-beda, yang merupakan potensi untuk dikembangkan dalam proses pembangunan ke depan terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di seluruh pelosok tanah air.

Mengingat pentingnya peran kebudayaan untuk pembangunan, maka diperlukan sebuah lembaga strategis yang menangani berbagai permasalahan kebudayaan di daerah, baik budaya dalam bentuk benda (*tangible*) maupun budaya dalam bentuk nilai atau non benda (*intangible*). Keberadaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh merupakan salah satu lembaga teknis yang kedudukannya sangat strategis dalam mengkoordinasikan penanganan masalah kebudayaan yang terjadi di daerah dan sebagai pemecahan masalah yang dilakukan sebagai perpanjangan tangan dari pusat pemerintahan (Kementerian). Selain itu keberadaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh juga menjadi pelopor dari pelestari budaya di daerah disebabkan kedudukannya yang berdasarkan *culture area*, sehingga mampu mengkoordinasikan kepada Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, maupun komunitas-komunitas budaya (seni, film dan pecinta sejarah) di Aceh dan Sumatera Utara.

## **B. Dasar Hukum**

Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awalnya nama kelembagaan UPT ini secara resmi muncul setelah keluarnya Keppres No. 44 tahun 1974 tentang status kelembagaan UPT.

Atas dasar Keppres di atas di samping dibentuk direktorat dan pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dibentuk unit lain, yaitu Unit Pelaksana Teknis, disingkat UPT. Dasar lain yang digunakan sebagai landasan pembentukan UPT adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 21/1990. Di dalam Keputusan itu secara khusus dicantumkan tentang pedoman dan proses pembentukan UPT. Dalam Kepmen itu UPT secara tegas disebut keberadaan sebagai unit organisasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok instansi induknya dan bersifat teknis operasional di lapangan.

Sejalan dengan perubahan yang terjadi pada lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh yang statusnya pada awal pembentukannya (sebelum tsunami) berada di bawah Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata secara teknis berada dalam lingkup kerja Direktorat Sejarah, Direktorat Tradisi dan Kepercayaan. UPT ini berkedudukan sebagai wadah operasional di bidang teknis serta penyelenggara kegiatan pengkajian, pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hasil kajian bidang kesejarahan dan kenilaitradisional daerah. Adapun landasan kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh saat itu adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0428/0/1981 tanggal 19 Desember 1981 tentang Perincian tugas Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0198/0/1994 tanggal 11 Agustus 1994 Jo. No. 001/0/1998 tanggal 7 Januari 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
3. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan

Pariwisata No. KEP-01/BP. Budpar/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

4. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.52/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.38/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya

Pergantian pemimpin negara tentu terjadi juga perubahan-perubahan, baik dalam susunan kabinet, maupun nomenklatur dari tiap-tiap lembaga atau kementerian yang ada di dalam kabinet itu. Salah satunya adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada saat jabatan periode kedua di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang kabinetnya disebut dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2011 diubah menjadi kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Unit-Unit kebudayaan diintegrasikan kepada Kementerian Pendidikan yang berubah namanya menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Balai Pelestarian Nilai Budaya memiliki landasan kerja :

1. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I kementerian

negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2014.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sejalan dengan perubahan nomenklatur maka berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I kementerian negara, Kemendikbud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya melaksanakan tugas-tugas di bidang kebudayaan yaitu:

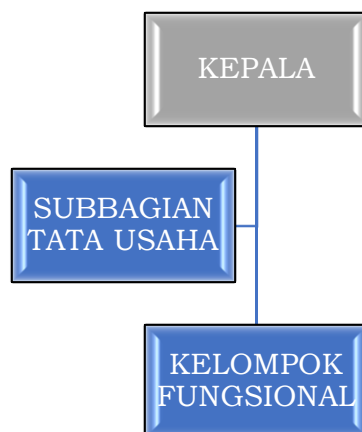
*“BPNB Aceh bertugas melaksanakan pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya”.*

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Balai Pelestarian Nilai Budaya mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan **pengkajian** terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
2. Pelaksanaan **pelindungan** tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
3. Pelaksanaan **pengembangan** tradisi, kepercayaan, kesenian,

- perfilman, dan kesejarahan;
4. Pelaksanaan **fasilitasi** di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
  5. Pelaksanaan **kemitraan** di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
  6. Pelaksanaan **pendokumentasian dan penyebaran informasi** perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
  7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

Berdasarkan organisasi dan tata kerjanya Balai Pelestarian Nilai Budaya memiliki struktur sebagai berikut :



#### **D. Permasalahan**

Sebagai upaya pelaksanaan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan maka permasalahan-permasalahan kebudayaan harus dapat

diselesaikan dengan baik. BPNB Aceh telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Peran pelaku budaya yang belum optimal dalam melestarikan kebudayaan, selain itu penguatan peran pelaku budaya juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem kebudayaan;
2. Kurangnya pengaruh kebudayaan dalam pendidikan karakter bagi anak-anak dan pemuda;
3. Pelestarian warisan budaya belum efektif;
4. Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;
5. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan; dan,
6. Pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal.



***Gedung Perkantoran BPNB Aceh***



## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melestarikan kebudayaan dan kesejarahan Aceh dan Sumatera Utara dengan menempatkan kebudayaan sebagai “panglima” dalam semua lini pembangunan. Untuk itu dalam rangka menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi sebuah visi dan misi yang ingin diwujudkan. Adapun visi dan misinya dapat dilihat sebagai berikut:

#### ***Visi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh***

***“Mewujudkan Masyarakat dan Pelaku Budaya Di Aceh dan Sumatera Utara yang Bermartabat dan Berkarakter”***

#### **Misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh**

***1. Melaksanakan kajian dan pengembangan dalam rangka melestarikan nilai budaya lokal;***

***2. Meningkatkan pelestarian nilai budaya, seni dan film serta sejarah untuk memperkuat jatidiri bangsa;***

***3. Melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang budaya lokal***

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional dalam bentuk rumusan tujuan strategis lembaga ini. Tujuan strategis merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dapat secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu lima tahun tersebut. Tentunya formulasi tujuan dan strategi ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih lanjut perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Adapun tujuan strategis yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh adalah:

### ***Tujuan Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh***

- 1. Meningkatkan hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti Pelestarian Nilai Budaya Aceh dan kerjasama dengan berbagai lembaga penelitian di Aceh dan Sumatera Utara.*
- 2. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pelestarian nilai budaya, seni, film dan sejarah di Aceh dan Sumatera Utara.*
- 3. Meningkatnya inventarisasi karya budaya yang akan terdaftar sebagai warisan budaya nasional dan dunia.*
- 4. Meningkatkan kesadaran pemahaman dan apresiasi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara terhadap nilai budaya seni film dan sejarahnya.*
- 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pelestarian Nilai Budaya Aceh baik tenaga peneliti maupun tenaga administrasi sehingga terbentuk pegawai yang profesional di*

*bidangnya.*

6. *Meningkatnya kesejahteraan pegawai, kenyamanan lingkungan kerja, ketertiban, pelayanan administrasi keuangan, persuratan, dan kepegawaian pada Pelestarian Nilai Budaya Aceh.*
7. *Meningkatnya fasilitas perkantoran guna peningkatan kinerja pegawai*

Tujuan akhir dari strategi yang dilakukan adalah ketahanan budaya pada masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pemahaman dan apresiasi masyarakat tentang sejarah dan budayanya dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan zaman sehingga nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sejarah dapat tetap lestari dan terus berkembang. Walaupun masyarakat di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh mengalami kemajuan dalam segala aspek kehidupan tetapi mereka tetap mengetahui dan mengakui jati dirinya sebagai orang Aceh dan orang Sumatera Utara.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka upaya peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dalam rangka pembangunan sejarah seni budaya dan film di Aceh dan Sumatera Utara merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Selain itu untuk menunjang profesionalitas peneliti dan pegawai administrasi harus juga dilengkapi dengan berbagai peralatan dan media yang sesuai dengan kebutuhan. Pada akhirnya dari tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah :

#### ***Sasaran Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh***

***“Meningkatkan Penelitian, Pengembangan dan Pelindungan serta Pemanfaatan Kebudayaan”***

### C. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada rencana strategis tahun 2015-2019, BPNB Aceh membuat perjanjian kinerja tahun 2018. Perjanjian kinerja menyajikan target-target kinerja yang akan dicapai selama 2018. Target kinerja tersebut merupakan tahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan, setiap target kinerja yang ditetapkan dalam target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja secara periodik dan pada akhir tahun capaian kinerjanya disajikan dalam laporan kinerja tahunan.

Pada awal tahun 2018, Kepala satker Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dengan unit utama pembinanya, dengan menetapkan 1 sasaran strategis, 4 indikator kinerja dan targetnya, dengan target anggaran sebesar Rp 6.047.289.000 dari total anggaran sebesar Rp 10.109.592.000 dan setelah revisi terakhir sebesar 5.972.213.000 dari total anggaran Rp 10.342.166.000. Adapun rincian target kinerja beserta target anggaran BPNB Aceh sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		TARGET ANGGARAN
1.	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan serta Pemanfaatan Kebudayaan	1. Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya	11	Naskah	Rp 876.770.000
		2. Jumlah Dokumen Pelestarian Nilai Budaya	25	Naskah	Rp 523.602.000
		3. Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi	160	Karya Budaya	Rp 390.152.000
		4. Jumlah Event Internalisasi Nilai Budaya	20	Event	Rp4.181.689.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>Rp 5.972.213.000</b>

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja BPNB Aceh

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018 BPNB Aceh menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Berikut tingkat ketercapaian dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis</b>	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan serta Pemanfaatan Kebudayaan
--------------------------	--

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Peningkatan Penelitian dan Pengembangan serta Pemanfaatan Kebudayaan</b>	1. Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya	11	11	100%
	2. Jumlah Dokumen Pelestarian Nilai Budaya	25	25	100%
	3. Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi	160	160	100%
	4. Jumlah Event Internalisasi Nilai Budaya	20	20	100%

Ditinjau dari capaian kinerja sasaran untuk tahun 2018 Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Sasaran Strategis

Peningkatan Penelitian dan Pengembangan serta Pemanfaatan Kebudayaan di BPNB Aceh yang dicapai dengan 4 indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) secara umum telah terlaksana dengan baik dengan seluruhnya mencapai target yang direncanakan. Adapun uraian tentang indikator kerja BPNB Aceh di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

<b>IKK 1</b>	Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya
--------------	---

Pada tahun 2018, BPNB Aceh menargetkan 11 (sebelas) naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya dari kategori sejarah dan budaya. Masing-masing kajian dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 5 orang peneliti dari BPNB Aceh dan juga akademisi di Aceh dan Sumatera Utara.

Capaian kinerja indikator yang pertama ini dilakukan melalui bedah proposal, pengumpulan data serta seminar hasil kajian. Untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kegiatan



***Silat Melayu di Deli Serdang, salah satu objek kajian pelestarian nilai budaya BPNB Aceh di tahun 2018***

kajian tersebut, maka dilaksanakan "kegiatan diawali dengan bedah proposal rencana penelitian dengan menghadirkan narasumber dari akademisi sebagai mitra bestari, serta pengamat

dari beberapa lembaga/instansi yang ada di wilayah kerja BPNB Aceh. Bedah proposal ini bertujuan untuk membantu peneliti menyusun proposal yang benar dan baik, dan menajamkan arah kajian dalam rangka meningkatkan kualitas proposal rencana penelitian. Setelah proposal dibedah sesuai dengan tema penelitian, proposal diperbaiki/disempurnakan dan selanjutnya dipakai sebagai pedoman dalam pengumpulan data lapangan, mengolah dan menganalisis data serta menyusun draf laporan.

Dengan berpedoman pada proposal yang sudah disempurnakan, peneliti melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan tersebut adalah dengan teknik wawancara, maupun kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan di lokasi penelitian. Dari data lapangan ini kemudian diolah dan dianalisa untuk disusun menjadi draf laporan hasil kajian.



***Suasana jalannya seminar hasil penelitian 2018 di aula BPNB Aceh***

Untuk menilai laporan hasil kajian tersebut, apakah sesuai dengan tema dan tujuan penelitian yang tertuang dalam proposal, maka

dilaksanakan presentasi dan evaluasi hasil

penelitian. Kegiatan presentasi dan evaluasi hasil penelitian ini dilakukan dalam forum ilmiah, dengan menghadirkan narasumber akademisi dan peserta dari lembaga/instansi terkait. Dalam forum tersebut narasumber dan peserta memberikan penilaian dan masukan terhadap naskah laporan hasil kajian sehingga laporan yang disusun sesuai dengan arah penelitian yang termuat dalam proposal. Hasil akhir dari kegiatan kajian ini adalah berupa

naskah hasil kajian untuk dicetak dan disebarluaskan kepada masyarakat dan instansi/ lembaga terkait, sebagai bahan pustaka dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.

Dari 11 kajian yang direncanakan oleh BPNB Aceh pada tahun 2018, seluruhnya dapat terlaksana dengan baik setelah melalui proses di atas. Adapun hasil kajiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Judul Kajian	Output
1	Nandong : Tradisi Lisan Simeulue	1
2	Relasi Islam-Kristen di Dolok Sanggul	1
3	Samadiyah dalam Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Aceh Selatan	1
4	Profil <i>Aneuk Meudagang</i> : Dulu dan sekarang	1
5	Air Mata Darah: Biografi A. Gani Mutyara	1
6	Potret Sosial Budaya Masyarakat di Desa-Desa Tua di Nias Selatan	1
7	Sumang dan Kemali: Kearifan Lokal Masyarakat Gayo di Aceh Tengah	1
8	Perempuan dalam Budaya Aceh	1
9	Silat Melayu dalam Budaya Masyarakat Deli Serdang	1
10	Profil Etnik di Sumatera Utara	1
11	Kajian Naskah Kuno	1
<b>Total</b>		<b>11 Naskah</b>

<b>IKK 2</b>	Jumlah Dokumen Pelestarian Nilai Budaya
--------------	---

Tahun 2018, BPNB Aceh telah menerbitkan dokumen pelestarian nilai budaya dan sejarah. Penerbitan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan BPNB Aceh untuk memanfaatkan hasil kajian sejarah dan budaya sehingga dapat



diketahui dan dibaca oleh masyarakat luas. Pada hasil penerbitan tersebut terdapat pula judul-judul yang bertema pendidikan karakter sebagai media penanaman karakter melalui literasi.

Adapun dokumen yang telah direncanakan diterbitkan dapat direalisasikan seluruhnya yaitu berupa kalender, 6 judul leaflet, 2 seri jurnal Suwa, 4 seri buletin Haba, 6 Judul booklet, dan 6 judul buku yang diisi oleh baik penulis dari lingkungan BPNB Aceh maupun dari luar BPNB Aceh.



**Leaflet Terbitan BPNB Aceh Tahun 2018**

<b>IKK 3</b>	Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi
--------------	--

Indonesia adalah negeri yang terdiri dari beranekaragam sukubangsa. Tiap-tiap sukubangsa tersebut memiliki kebudayaan yang bermacam-macam. Potensi tersebut menjadikan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, selain karena kaya akan budayanya juga memiliki jatidiri sebagai bangsa Indonesia. Kekayaan budaya itu bisa terdiri dari budaya material (kebendaan) yang kasat mata maupun kebudayaan yang imaterial (nonkebendaan) yang tidak

kasat mata berupa pengetahuan, ide, gagasan, pemikiran yang ada di setiap pemilik kebudayaan.

Berdasarkan alasan tersebut Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pencatatan,



*Mekhemu, Senjata Tradisional Sukubangsa Alas yang menjadi salah satu karya budaya yang diinventarisasi di tahun 2018*

penginventarisasian dan pendokumentasian berupa film dokumentasi karya

budaya, dengan tujuan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Untuk tahun anggaran 2018, BPNB Aceh merencanakan kegiatan inventarisasi karya budaya sebanyak 16 karya budaya yang ada di Aceh dan Sumatera Utara. Adapun rincian inventarisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**WARISAN BUDAYA PROVINSI ACEH**

No.	Etnis	Jumlah karya budaya yang diinventarisasi
1.	Aceh	10
2.	Gayo	10
3.	Aneuk Jamee	10
4.	Singkil	10
5.	Simeulue	10
6.	Kluet	10
7.	Alas	10
8.	Tamiang	10

**WARISAN BUDAYA PROVINSI SUMATERA UTARA**

No.	Etnis	Jumlah karya budaya yang diinventarisasi
1.	Mandailing	10
2.	Toba	10
3.	Melayu	10
4.	Nias	10
5.	Simalungun	10
6.	Karo	10
7.	Pakpak	10
8.	Angkola	10

Dari 160 karya budaya yang direncanakan diinventarisasi, seluruhnya dapat terealisasi 100%. Adapun selain formulir pencatatan karya budaya, output lain yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu 16 video perekaman mata budaya dari masing-masing etnis.

<b>IKK 4</b>	Jumlah Event Internalisasi Nilai Budaya
--------------	---

Sesuai fungsi utamanya, pada tahun 2018 BPNB Aceh melakukan dan memberikan kegiatan dalam rangka internalisasi nilai budaya kepada masyarakat, siswa, mahasiswa dan pelaku budaya lainnya melalui berbagai kegiatan internalisasi nilai budaya. Dari 20 event yang direncanakan, seluruhnya dapat terlaksanakan dengan baik. Adapun rincian event internalisasi nilai budaya sebagai berikut:

No	Event Internalisasi Nilai Budaya	Lokasi
1	Sinkronisasi dan Konsolidasi Kegiatan Pelestarian nilai Budaya Aceh dan Sumatera Utara	Takengon, Aceh
2	Lawatan Sejarah Daerah	Banda Aceh-Aceh Jaya
3	Jejak Tradisi daerah	Bireuen, Aceh
4	Pelestarian Tradisi Makmeugang	Banda Aceh
5	Seminar Hasil Penelitian dan Pagelaran Kesenian Budaya se-Indonesia	Papua Barat
6	Dialog Budaya Daerah	Medan, Sumut
7	Dialog Budaya Nasional	Bandung
8	Dialog Budaya Religi	Banda Aceh, Aceh
9	Belajar Bersama Maestro	Tapanuli Utara, Sumut
10	Kemah Kerja Budaya	Aceh Tengah, Aceh
11	Pemutaran Bioskop Keliling	Aceh
12	Festival Permainan Tradisional Anak 2018	Banda Aceh, Aceh
13	Partisipasi Aktif dalam Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)	Banda Aceh, Aceh
14	Lomba Rally Foto Budaya	Singkil, Aceh
15	Kegiatan Vrederburg Fair Berupa Pameran dan Panggung Hiburan Masyarakat	Yogyakarta

16	Pameran Gebyar Kebangsaan di Museum Perkebunan	Medan, Sumut
17	Saka Widya Budaya Bhakti Pramuka	Banda Aceh, Aceh
18	Pendukung Platform Indonesia Kabupaten Gayo Lues dengan Kegiatan Bejamu Saman	Gayo Lues, Aceh
19	Pergelaran Budaya dan Seni Multikultur 2018 di Padang	Padang
20	Bantuan Pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan	Aceh – Sumut



***Lawatan Sejarah Daerah (Laseda) 2018, event internalisasi nilai budaya yang dilaksanakan untuk Menumbuhkan kesadaran sejarah pada kalangan generasi muda***

Dengan ketercapaian target kinerja pada tahun ini berarti BPNB Aceh berhasil melaksanakan seluruh targetnya selama 3 tahun terakhir. Walaupun demikian, masih diperlukan lebih dalam memaksimalkan setiap program yang dilaksanakan agar tujuan strategis BPNB aceh terlaksana dengan optimal. Adapun perbandingan capaian kinerja BPNB Aceh tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Targ et	Real isasi	%	Targ et	Real isasi	%
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan serta Pemanfaatan Kebudayaan	1. Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya	9	9	100	9	9	100	11	11	100
	2. Jumlah Dokumen Pelestarian Nilai Budaya	46	46	100	25	25	100	25	25	100
	3. Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi	8	8	100	160	160	100	160	160	100
	4. Jumlah Peserta Internalisasi Nilai Budaya /Jumlah Event Internalisasi Nilai Budaya	2.365 Peserta	2.365 Peserta	100	14	14	100	20	20	100

## B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018, BPNB Aceh memiliki DIPA dengan dokumen Nomor: SP DIPA- 023.15.2.567958/2017 tanggal 5 Desember 2017 dengan pagu sebesar Rp 10.342.166.000,- Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terdapat 2 kali revisi, adapun rincian revisi DIPA yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Revisi I tanggal 9 April 2018 dengan pagu sebesar Rp 10.342.166.000 Merupakan revisi terkait penghapusan tanda bintang dan adanya penambahan pagu untuk kegiatan Pra Kongres Kebudayaan Indonesia.
2. Revisi II tanggal 28 November 2018 Rp 10.342.166.000, adanya optimalisasi kegiatan.

Dari total pagu anggaran tersebut, pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja revisi terakhir adalah sebesar Rp 5.972.213.050 atau 58% dari total anggaran yang diterima. Pagu anggaran yang diperjanjikan tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian perencanaan dan realisasinya sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Pemanfaatan dan Pembinaan Nilai Budaya	Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya	Naskah	876.770.000	842.074.900	96,04
	Dokumen Pelestarian Nilai Budaya	Naskah	523.602.000	509.052.000	97,22
	Karya Budaya yang Dinventarisasi	Karya Budaya	390.152.000	382.319.750	97,99
	Event Internalisasi Nilai Budaya	Event	4.181.689.000	4.055.076.400	96,97

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran di tiap indikator kinerja BPNB Aceh sudah sangat baik, hampir mencapai 100%. Adapun kendala yang dihadapi dalam merealisasikan

anggaran yaitu antara lain:

1. adanya pemblokiran di awal tahun sehingga terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.
2. adanya perubahan jadwal kegiatan dikarenakan permintaan dari stakeholder terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan
3. Pengembalian uang perjalanan dan uang penginapan pada kegiatan penelitian dikarenakan tarif hotel dan harga tiket di lapangan lebih murah dari pagu yang telah dianggarkan.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain adalah memperkuat koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan provinsi agar kegiatan yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar, khususnya pada saat survey maupun pada rapat teknis di awal tahun.

Selain sasaran strategis di atas BPNB Aceh mendapatkan anggaran berupa pengelolaan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan yang didukung oleh beberapa *output* sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

<b>KODE OUTPUT</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>PAGU RKAKL-DIPA</b>	<b>REALISASI-DIPA</b>	<b>%</b>
5630.950	Layanan Dukungan Manajemen	562.758.000	560.403.300	99,58
5630.951	Layanan Internal (Overhead)	559.000.000	555.570.000	99,39
5630.994	Layanan Perkantoran	3.248.195.000	3.174.543.857	97,73

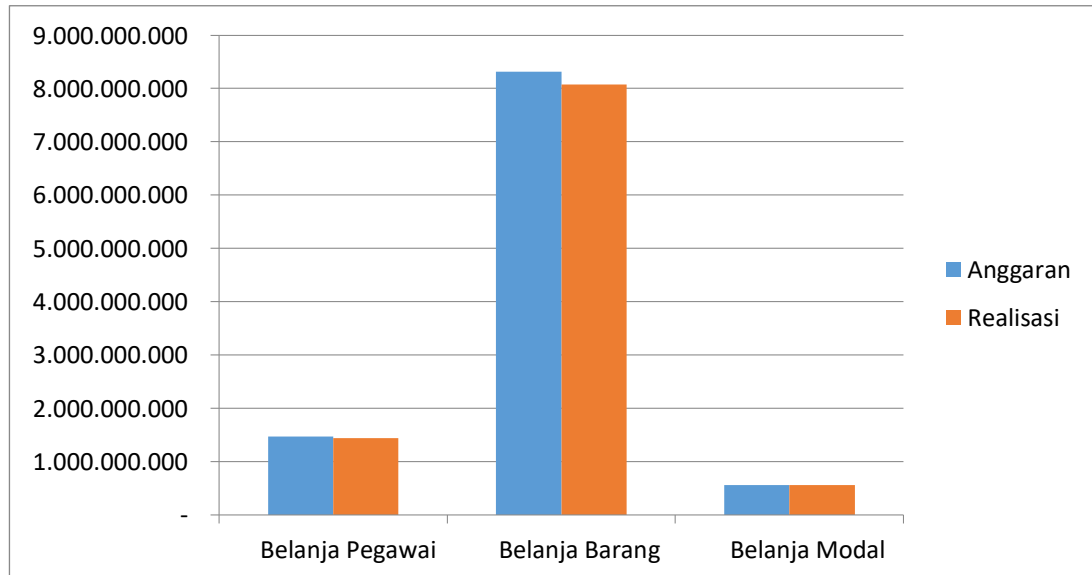
Selanjutnya, alokasi anggaran unit kerja di lingkungan BPNB Aceh dalam DIPA tahun 2018 dibagi dalam 3 (tiga) pos pengeluaran belanja, yaitu: (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal. Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran belanja Barang meliputi belanja

operasional, non operasional, jasa, perjalanan dinas. Pos pengeluaran belanja Modal meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

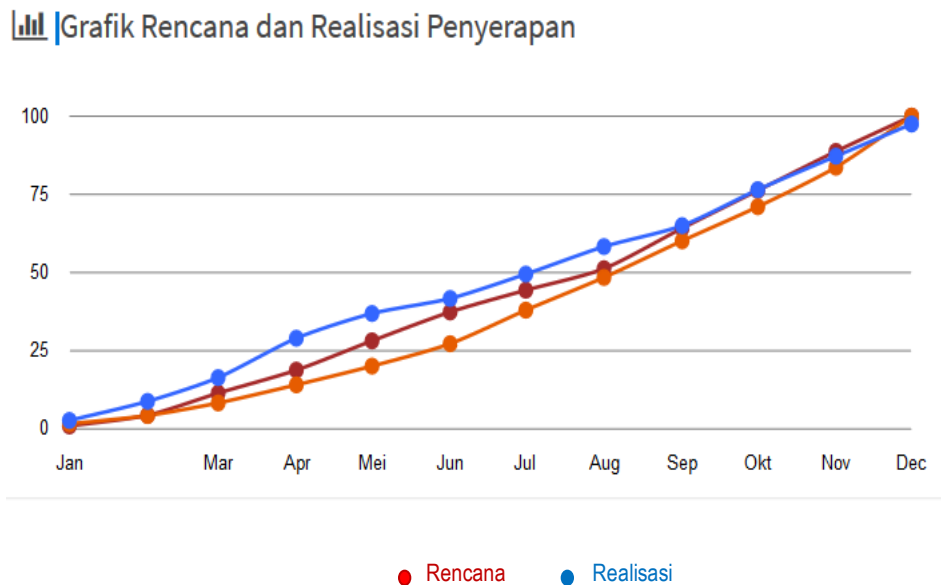
URAIAN	Per 31 Desember 2018		% thd Angg
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	1.467.625.000	1.439.329.907	98,07%
Belanja Barang	8.315.541.000	8.077.864.800	97,14%
Belanja Modal	559.000.000	555.570.000	99,39%
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>10.342.166.000</b>	<b>10.072.764.707</b>	<b>97,40%</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik Realisasi Anggaran BPNB Aceh Berdasarkan Aplikasi SimKeu Kemendikbud tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Grafik :  
Realisasi Anggaran BPNB ACEH per 31 Desember 2018



Secara persentase, realisasi belanja BPNB Aceh yang sebesar 97,40% berada di bawah target kontrak kinerja Tahun 2018 sebesar 100% (berdasarkan data Simkeu Kemdikbud Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya Efisiensi anggaran pada pelaksanaan kegiatan.
2. Frekuensi Dinas Luar pegawai BPNB Aceh cukup tinggi, dikarenakan ada beberapa kegiatan yang lokasinya di luar daerah dan pegawai Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh yang melakukan kegiatan penelitian atau kegiatan teknis nonpenelitian di luar daerah. Hal ini menyebabkan penurunan penyerapan Belanja Uang Makan PNS.

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik UPT BPNB Aceh setiap tahunnya telah diaudit oleh tim audit Inspektorat Jenderal Kebudayaan.





## BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh atas pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2018. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) di dunia kebudayaan. Laporan Kinerja ini menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh telah memenuhi target baik dari segi output maupun anggaran. Dari empat indikator kerja sasaran strategis yang ditetapkan, seluruhnya berhasil dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang direncanakan dan berjalan lancar. Dilihat dari sisi realisasi anggaran, BPNB Aceh pada tahun 2018 memperoleh anggaran sebesar Rp 10.342.166.000,00 (Sepuluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun, telah terealisasi sebesar Rp 10.072.764.707 (Sepuluh milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau 97,40% sampai dengan 31 Desember tahun 2018. Jumlah ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang daya serapnya sebesar 96,60 %. Hal ini disebabkan karena Kegiatan/program yang direncanakan

dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Walaupun demikian, ada beberapa Saran untuk perbaikan dan keberlanjutan kegiatan dimasa masa yang akan datang. Saran tersebut antara lain: Meningkatkan kerjasama baik dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat khususnya komunitas penggiat budaya dalam kegiatan-kegiatan pelestarian budaya untuk melaksanakan pemajuan kebudayaan; mendorong stakeholder terkait agar memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pelestarian budaya bersama-sama sesuai dengan yang direncanakan; dan melaksanakan kaderisasi pegawai dan penambahan jumlah pegawai karena jumlahnya sangat terbatas.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sitem perencanaan pembangunan.

## LAMPIRAN

- RENSTRA BPNB ACEH 2015-2019
- PENGUKURAN KINERJA BPNB ACEH 2018
- PERJANJIAN KINERJA 2018
- Pernyataan Telah Direviu

## Lampiran 1. Formulir Renstra

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN : 2015 SD : 2019

TAHUN REVISI : 2018

BPNB ACEH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN
					2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Meningkatnya Penelitian, Pengembangan dan Perlindungan serta Pemanfaatan Kebudayaan	1	Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya	9 naskah	9 naskah	10 naskah	11 naskah	10 naskah	Pelestarian Nilai Budaya	Pengkajian Nilai Budaya dan Sejarah
			2	Jumlah Dokumen Pelestarian Nilai Budaya	46 Dokumen	46 Dokumen	25 Naskah	25 Naskah	25 Naskah	Pelestarian Nilai Budaya	Penerbitan Dokumen/naskah Pelestarian Nilai Budaya
			3	Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasikan	240 Karya Budaya	16 Karya Budaya	160 Karya Budaya	160 Karya Budaya	160 Karya Budaya	Pelestarian Nilai Budaya	Pengumpulan dan Pendataan Karya Budaya untuk Diinventarisasikan
			4	Peserta/Event Internalisasi Nilai Budaya	1900 Peserta	2365 Peserta	14 Event	20 Event	16 Event	Pelestarian Nilai Budaya	Penyelenggaraan Kegiatan untuk Internalisasi Nilai Budaya
			5	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	0 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	Pelestarian Nilai Budaya	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
			6	Jumlah Fasilitas Perkantoran dan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	125 Unit	128 Unit	113 Unit	114 Unit	115 Unit	Pelestarian Nilai Budaya	Pengadaan Fasilitas Perkantoran dan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
			7	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Pelestarian Nilai Budaya	Layanan Perkantoran

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA BPNB ACEH 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KINERJA			Anggaran			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatnya Pemanfaatan dan Pembinaan Nilai Budaya	Event Internalisasi Nilai Budaya	EVENT	20	20	100	4.181.689.000	4.055.076.400	96,97	
		Dokumen Pelestarian Nilai Budaya	NASKAH	25	11	100	523.602.000	509.052.000	97,22	
		Karya Budaya yang Dinventarisasi	KARYA BUDAYA	160	160	100	390.152.000	382.319.750	97,99	
		Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya	NASKAH	11	11	100	876.770.000	842.074.900	96,04	
2	Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Pelestarian Nilai Budaya	Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Pelestarian Nilai Budaya	LAYANAN	1	1	100	562.758.000	560.403.300	99,58	



**Perjanjian Kinerja Tahun 2018  
Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh  
Dengan  
Direktur Jenderal Kebudayaan**

**TUGAS**

Melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

**FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, saya akan mengkoordinir:

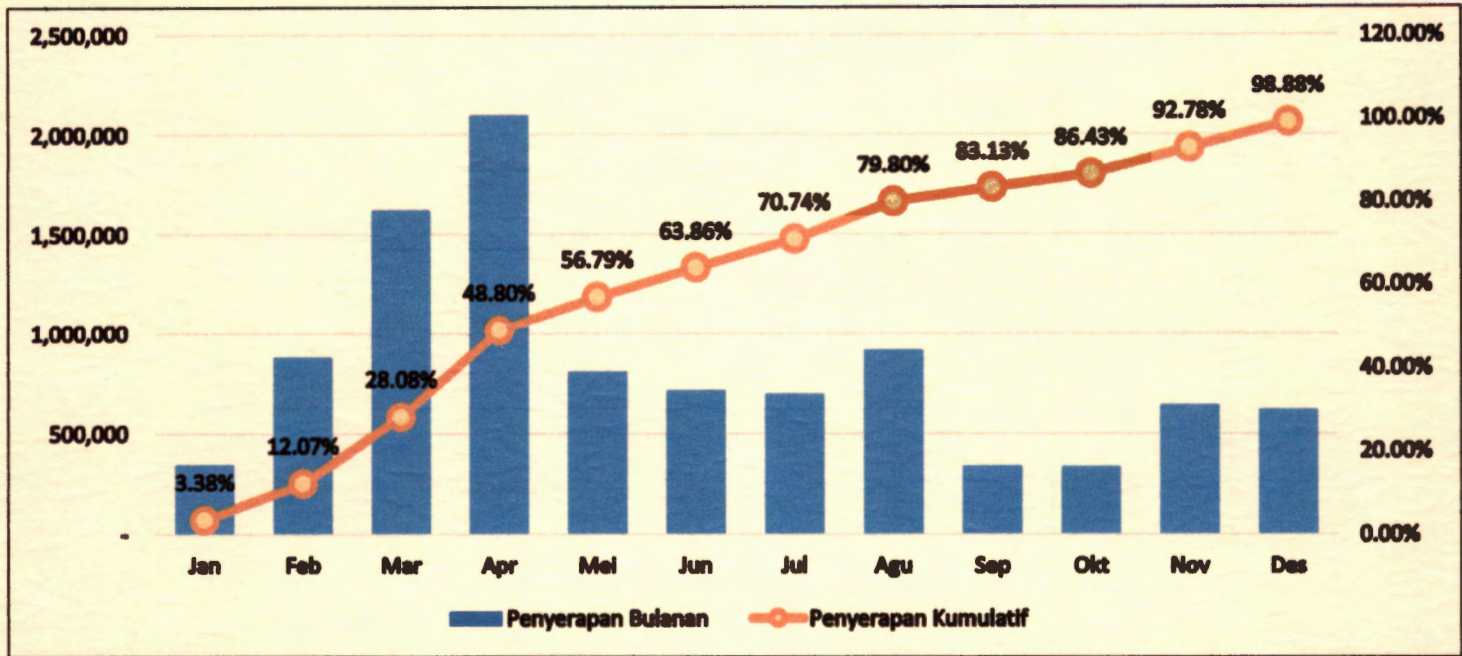
- a. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- b. Pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- e. Pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

**TARGET CAPAIAN****Kegiatan Pelestarian Nilai Budaya**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan serta Pemanfaatan Kebudayaan	1. Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya	11 Naskah	876.770.000
		2. Jumlah Dokumen Pelestarian Nilai Budaya	25 Naskah	523.602.000
		3. Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi	160 Karya Budaya	390.152.000
		4. Jumlah Event Internalisasi Nilai Budaya	20 Event	4.256.765.000

Jumlah alokasi anggaran kegiatan pelestarian nilai budaya wilayah kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebesar **Rp10.109.592.000,-** (*Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

**Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018  
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh**



Ket/Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Penyerapan Kumulatif	341.739	1.220.078	2.838.518	4.933.397	5.741.177	6.455.567	7.151.627	8.067.883	8.404.358	8.737.270	9.379.748	9.996.592
Penyerapan bulanan	341.739	878.338	1.618.440	2.094.879	807.780	714.389	696.060	916.256	336.475	332.912	642.478	616.844
%	3,38%	12,07%	28,08%	48,80%	56,79%	63,86%	70,74%	79,80%	83,13%	86,43%	92,78%	98,88%

**EVALUASI**

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2018

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid

Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh

Irini Dewi Wanti



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh untuk tahun anggaran 2018 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banda Aceh, 25 Januari 2019  
KETUA TIM PEREVIU



**Essi Hermaliza, S.Pd.I.**  
NIP 198209202006052001

No	Pernyataan		Check List
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja</li> <li>2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja</li> <li>3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja</li> <li>5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya</li> </ol>	
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja</li> <li>5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra</li> <li>7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja;</li> <li>8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan;</li> <li>9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran;</li> <li>10. IKSS/IKP/IKK telah SMART</li> </ol>	





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH**  
*(Wilayah Kerja Provinsi Aceh - Sumut)*

---

Jln. TWK. Hasyim Banta Muda No. 17, Kp. Mulia, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh - 23123.

☎ 0651-23226 | 📠 0651-23226 | ✉ [bpnbaceh@kemdikbud.go.id](mailto:bpnbaceh@kemdikbud.go.id)

🌐 <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaseh/>